



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

e.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja-PD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.

- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- h. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- j. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- k. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;

- p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;
- q. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar;
- r. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- t. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar; dan
- dd. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

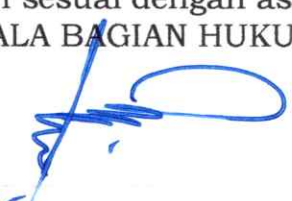
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

9. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2KB dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya.

RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/ Renja Kementerian tahun 2026, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n + 1;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2026.

Renja Dinas P3AP2KB merupakan dokumen perencanaan yang strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah, Dinas P3AP2KB memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Renja DP3AP2KB ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini juga mengintegrasikan program-program terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Dengan Renja DP3AP2KB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak serta mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AP2KB TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AP2KB
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS P3AP2KB

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P3AP2KB
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS P3AP2KB

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AP2KB TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AP2KB

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi capaian s/d tahun 2023, 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Dinas P3AP2KB Tahun 2021 - 2026. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2025, Dinas P3AP2KB Kota Blitar melaksanakan 2 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan 8 program dengan 26 kegiatan dan 71 sub kegiatan. Adapun programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pemenuhan Hak Anak
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Pengendalian Penduduk
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada bab ini disajikan revidi terhadap hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2025 yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Adapun hasil rekapitulasinya adalah seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar sampai dengan Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
					Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85.36	85,28	A / 85,32	85.66	100.40	85.67	85.67	100.36
					Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85.36	85,28	A / 85,32	85.66	100.40	85.67	85.67	100.36
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	85.02	Baik / 86	88.45	102.85	87	87	98.86
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	7	7	7	100.00	7	21	75.00
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	13	13	13	100.00	13	39	75.00
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar Tunjangan ASN	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	20	23	23	100.00	25	25	104.17
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	8	2	2	2	100.00	17	21	262.50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Triwulanan/Semesteran SKPD									
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	297	99	99	93	93.94	20	212	71.38
2	8	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	33	33	33	31	93.94	31	31	93.94
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	100.00	1	3	75.00
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5	5	5	100.00	5	15	75.00
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	4	4	4	100.00	4	12	75.00
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	6	6	4	66.67	2	12	50.00
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	100.00	1	3	75.00
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	24	24	24	100.00	12	60	62.50
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	60	60	53	88.33	40	153	63.75
2	8	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1	1	1	100.00	1	3	75.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1	1	100.00	9	11	275.00
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Persen	100	99.85	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1	1	1	100.00	1	3	75.00
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	33	36	36	100.00	36	105	72.92
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	2	2	2	100.00	2	6	75.00
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	164	32	41	35	85.37	37	104	63.41
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168	42	42	42	100.00	57	141	83.93
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1	1	1	100.00	2	4	100.00
2	8	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3	3	3	100.00	4	10	83.33
					Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76.59	67,63	74.2	67.64	91.16	74.2	67.64	88.31

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/Kegi atan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Progr am/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	100	63,3	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
						Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Persen	0.33	0.51	0.33	0.33	100.00	0.33	0.33	100.00
						Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Persen	48	59.5	47	47	100.00	45	45	93.75
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Persen	47	34.24	37	28.04	75.78	42	33	70.21
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	13	3	4	4	100.00	4	11	84.62
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persen	20.73	57.93	20.54	20.54	100.00	20.67	20.67	99.71
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	30	7	9	9	100.00	7	23	76.67
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	6	1	1	1	100.00	1	3	50.00
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Organisasi	12	3	1	1	100.00	3	7	58.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	84	21	21	21	100.00	21	63	75.00
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2468	614	2759	2715	98.41	614	3943	159.76
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2	1	1	100.00	3	6	60.00
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang	Orang	43	7	12	16	133.33	36	59	137.21

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan									
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8	2	2	2	100.00	2	6	75.00
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	460	110	35	35	100.00	42	187	40.65
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2	2	2	100.00	2	6	60.00
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelemagaan pemenuhan hak anak	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan	Dokumen	10	2	2	2	100.00	2	6	60.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak/Orang	410	100	50	50	100.00	100	250	60.98
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6	2	3	3	100.00	2	7	116.67
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	7	2.01	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	kegiatan	6	5	5	5	100.00	3	13	216.67
2	8	7	2.01	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang	30	0	10	10	100.00	272	282	940.00
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	60	2	30	29	96.67	24	55	91.67
2	8	7	2.02	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	layanan	75	0	60	59	98.33	85	144	192.00
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	8	7	2.03	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	420	2	348	348	100.00	400	750	178.57
					Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	0.96	1.19	1.00	0.93	96,92	1,00	1	104.17
					Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Indeks	2	1.92	1,94	1,93	97.00	1,94	1.94	97.00
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	25.21	25.03	25.1	25.99	100,00	25.14	25.14	99.72
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23.2	23.07	23.1	22.4	100,00	23.12	23.1	99.57
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1	1	1	100.00	0	2	50.00
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi	Satuan Pendidikan	20	3	5	5	100.00	6	14	70.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/Kegi atan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Progr am/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal									
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	4	1	1	2	200.00	3	6	150.00
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	27	6	6	6	100.00	21	33	122.22
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	4	1	1	1	100.00	12	14	350.00
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	6	1	1	1	100.00	1	3	50.00
2	14	2	2.02	20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	4	1	1	1	100.00	1	3	75.00
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Indeks	8.01	10.7	8.55	8.1	86.13	8.25	8.25	103.00
						Persentase KB Aktif	Persen	74.67	74.36	74.4	67.4	99,64	74.46	74.46	99.72
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Kecamatan	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	16	3	3	3	100.00	0	6	37.50
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	18	4	4	4	100.00	3	11	61.11

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)									
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	28	6	6	6	100.00	9	21	75.00
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	18	4	4	4	100.00	5	13	72.22
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	4	1	1	1	100.00	10	12	300.00
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1442	359	361	361	100.00	421	1141	79.13
2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	laporan	12	0	4	4	100.00	0	4	33.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB))									
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	50.76	50.64	50.45	44.8	88.80	50.56	50.56	99.61
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	101	22	24	25	104.17	0	47	46.53
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2952	323	1000	943	94.30	488	1754	59.42
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	20	13	15	15	100.00	0	28	140.00
2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	620	150	150	150	100.00	0	300	48.39
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	16	3	3	3	100.00	4	10	62.50
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	610	323	270	270	100.00	20	613	100.49
2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	480	100	150	150	100.00	0	250	52.08
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	dan Pembinaan Kesertaan KB									
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	1	1	100.00	0	2	200.00
2	14	3	2.04	5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kampung	21	-	21	21	100.00	0	21	100.00
2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persen	21	6	21	21	100.00	21	21	100.00
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Persen	74.67	76.43	74.4	74.67	100.36	74.46	74.4	99.64
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Persen	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	3	0	1	1	100.00	1	2	66.67
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	1	1	1	100.00	3	5	83.33
2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Unit	73	30	20	20	100.00	10	60	82.19

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia									
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	807	6	807	807	100.00	60	807	100.00
2	14	4	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		2	1	1	1	100.00	0	2	100.00
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	-	3	3	100.00	3	3	100.00
2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	-	3	3	100.00	3	3	100.00
2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kelompok	9664	0	9664	9164	94.83	2823	2823	29.21

Dari tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar sampai dengan Tahun 2025 diatas dapat diketahui :

Realisasi target kinerja pada Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 yaitu :

1. Indikator Tujuan :

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari target 74,2 realisasi 67,64, dengan capaian 88%
- b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari target 0,6 tercapai 0,60, dengan capaian 100%

2. Indikator Sasaran :

- a. Persentase kelembagaan PUG aktif dari target 100% realisasi 100%, capaian sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil;
- b. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan, target 100%, realisasi 100%, capaian 100% dengan predikat sangat berhasil;
- c. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan, target 100%, realisasi 100%, capaian 100% dengan predikat sangat berhasil;
- d. Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi) target 1,94, realisasi 1,93, capaian sangat berhasil;
- e. Nilai SAKIP perangkat daerah, target nilai A (85,32) realisasi 85,66, capaian 100.39% dengan predikat sangat berhasil

3. Indikator Program

- a. Program Pengarusutamaan Gender;
 - 1) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, target 100 %, realisasi 100%, dengan capaian 100%.
 - 2) Persentase perempuan pengambilan keputusan publik; target 47%, realisasi 47%, dengan capaian 100%
 - 3) Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis; target 0,33%, capaian 0,33% dengan capaian 100%.
- b. Program Perlindungan Perempuan;
Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan, target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
- c. Program Pemenuhan Hak Anak;
Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak, target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
- d. Program Perlindungan Khusus Anak;
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih; target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%.
- e. Program Pengendalian Penduduk;
Rata-rata usia kawin pertama wanita target 23,55 tahun, realisasi 25,99 tahun dengan capaian 108,78%
- f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - 1) Persentase peserta KB aktif; target 74,4 %, realisasi 67,40 dengan capaian 100,49%
 - 2) Cakupan Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need); target 8,55%, realisasi 8,10%, capaian 83,92%
- g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB; target 74,4%, realisasi 74,65% dengan capaian 103,28%.

- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); target 83, realisasi 85,06, capaian 102,48%.
- a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - 1. Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan;
 - 2. Program Perlindungan Perempuan;
 - 3. Program Pemenuhan Hak Anak;
 - 4. Program Perlindungan Khusus Anak
- b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - 1. Program Pengendalian Penduduk;
 - 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase peserta KB aktif
 - 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
 - 1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)
 - 2. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
 - ✓ Faktor terpenuhi/melebihi target kinerja pada program ini adalah penetapan target kinerja yang sesuai dengan Renstra, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan antar perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Blitar.
 - ✓ Faktor penyebab tidak tercapainya : 1). Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) disebabkan karena motivasi masyarakat khususnya PUS untuk mengikuti KB MKJP menurun; 2). Sub kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang disebabkan karena data Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kota Blitar diperkirakan menurun sesuai hasil updating data. Hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pencapaian target indikator kinerja Dinas P3AP2KB.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra DP3AP2KB Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan akan mendukung tercapainya target indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- f. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut Mengintensifkan koordinasi dengan provinsi, organisasi perangkat daerah lainnya, organisasi masyarakat ataupun dengan mitra kerja lainnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dapat dikatakan sangat berhasil (dengan rata-rata keberhasilan capaian sasaran strategis 109,30%), walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/S PM	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,87	67,87	74,2	75,50	68,61	67,63	67,64	68,41	-	-	IDG tidak lagi dihitung sebagai indikator
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	IKU	47,26	47,28	100	100	100	55,03	63,3	100	100	100	Target tercapai
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
	Laju	IKU	0,67	0,67	1,00	0,98	0,96	0,617	0,60	0,98	-	-	Tidak lagi

[illegible]

No	Indikator	IKU/ IKK/S PM	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	IKK	14	12	8	6	13,81	12	8	6	-	-	Target tercapai
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	IKK	2,04	2,03	1,94	1,96	1,92	1,92	1,94	1,96	1,93	1,93	Target tercapai
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	IKK	20,5	20,75	17,20	17,19	1,31	17,2	17,20	17,19	16,95	16,75	Target tercapai
6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	IKK	27,5	30	100	100	100	100	100	100	-	-	Tidak lagi dihitung sebagai indikator

No	Indikator	IKU/ IKK/S PM	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	IKK	74,32	74,35	64,66	64,70	72,75	62,42	64,67	64,70	-	-	Target tercapai
8	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	Tidak lagi dihitung sebagai indikator
9	Persentase peserta KB aktif MKJP	IKK	43,8	43,95	38,36	38,38	37,75	38,3	38,36	38,38	-	-	Tidak lagi dihitung sebagai indikator
10	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	IKK	45,5	45,6	81,95	82,00	80,65	81,91	81,95	82,00	-	-	Tidak lagi dihitung sebagai indikator
11	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	IKK	67,8	67,95	60,14	60,32	14,28	14,28	60,15	60,32	-	-	Tidak lagi dihitung sebagai indikator

No	Indikator	IKU/ IKK/S PM	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	IKK	24,5	24,75	85,96	85,97	85,94	85,95	85,96	85,97	-	-	Tidak lagi dihitung sebagai indikator

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Penilaian status pencapaian IDG berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah ($IDG < 50$); sedang ($50 \leq IDG < 60$); tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$); sangat tinggi ($IDG > 80$) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021).

IDG Kota Blitar tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut :



Pada tahun 2024 IDG Kota Blitar naik bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana pada tahun 2023 IDG Kota Blitar 67,63 sedangkan di tahun 2022 IDG Kota Blitar 68,61 dan tahun 2021 sebesar 68,6 meskipun masih termasuk kategori tinggi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IDG, yaitu :

- a. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan. Menurut BPS Kota Blitar Dalam Angka 2025 Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,6 tahun dari 10,78 tahun menjadi 10,82 tahun pada tahun 2024.

Tahun Year	IPM HDI (PoIn)	Komponen IPM Component of HDI			
		Umur Harapan Hidup (UHH) Life Expectancy (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Expected Years of Schooling (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Mean Years of Schooling (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Adjusted per Capita Expenditure (000 Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	78,88	74,39	14,32	10,11	13.733
2021	79,27	74,46	14,33	10,35	13.816
2022	80,15	74,71	14,56	10,65	14.058
2023	80,78	74,97	14,57	10,78	14.548
2024	81,44	75,20	14,81	10,82	14.933

Catatan/Note: Menggunakan metode baru (UHH menggunakan proyeksi penduduk Long Form SP2022)/
Used new method (UHH use civil projektion Long Form SP2022)

Sumber/Source: BPS Kota Blitar/BPS - Statistics of Blitar Municipality

Sedangkan pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan menurut tingkat pendidikan di Kota Blitar, menurut BPS terbanyak adalah pendidikan Tingkat SMTA Kejuruan pada perempuan sebanyak 111 orang. Rincian pencari kerja sesuai tingkat pendidikan sesuai Kota Blitar Dalam Angka 2025 adalah sebagai berikut :

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	-	-	-
SD <i>Primary school</i>	5	36	41
SMTU Umum <i>Junior High School</i>	23	105	128
SMTU Kejuruan <i>Vocational Junior High School</i>	-	-	-
SMTA Umum <i>Senior High School</i>	64	68	132
SMTA Kejuruan <i>Vocational Senior High School</i>	41	111	152
Diploma I/II/III/Akademi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	5	3	8
Universitas (S1 dan S2) <i>University (Bachelor & Master degree)</i>	18	30	48
Kota Blitar	156	353	509

Sumber/Source : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Blitar/*Cooperatives, Micro, Small and Middle Enterprises and Labor Agency of Blitar Municipality*

- b. Selanjutnya menurut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,2021) semakin meningkatnya persentase angkatan kerja perempuan seharusnya diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang tidak bias gender sehingga mampu menyerap angkatan kerja tanpa ada diskriminasi gender. Sumbangan pendapatan perempuan yang samplingnya hanya diambilkan dari pekerja buruh wanita, sedangkan pekerja wanita di Kota Blitar tidak hanya buruh, tetapi ada juga yang di sektor formal.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah Total	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Labour Force Participation Rate (%)</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	8.558	24.266	64,73
1	11.157	25.325	55,94
2	11.335	50.787	77,68
3	5.062	21.780	76,76
Jumlah/Total	36.112	122.158	70,44

Catatan/Note: ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
3. Perguruan Tinggi/Collage
² 1. Mencari pekerjaan/Looking for work
2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers)
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

TPAK terbesar ada pada pendidikan SMA dengan nilai 77,68% atau sejumlah 50.782 orang.

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/ <i>Economically active</i>	49.278	36.768	86.046
1. Bekerja/ <i>Working</i>	46.905	34.747	81.652
2. Pengangguran terbuka/ <i>Unemployment</i>	2.373	2.021	4.394
II. Bukan angkatan kerja / <i>Not economically active</i>	10.802	25.310	36.112
1. Sekolah/ <i>Attending school</i>	...	...	8.603
2. Mengurus rumah tangga/ <i>Housekeeping</i>	...	...	24.935
3. Lainnya/ <i>Others</i>	...	...	2.574
Jumlah/Total	60.080	62.078	122.158

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Angkatan Kerja perempuan sebanyak 36.768 orang lebih sedikit bila dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki yang sebanyak 49.278 orang.

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	11.310	8.798	20.108
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	3.986	3.928	7.914
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	3.571	1.012	4.583
Buruh/Karyawan/Pegawai Employee	21.337	16.289	37.626
Pekerja bebas Casual worker	3.180	320	3.500
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	3.521	4.400	7.921
Jumlah/Total	46.905	34.747	81.652

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Jumlah buruh/karyawan/pegawai perempuan sebanyak 16.289 orang, ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan buruh/karyawan/pegawai laki-laki yang mencapai 21.337 orang. Dan jumlah total sebanyak 81.652 orang.

- c. Terakhir pada dimensi pemberdayaan, ketimpangan gender dilihat dari persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Semakin besar skor yang diraih, maka semakin besar angka kursi yang diduduki oleh perempuan pada parlemen. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.
- Keterlibatan perempuan di parlemen di Kota Blitar belum mencapai 30%. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Blitar yang perempuan menurut BPS Blitar dalam Angka 2025 ada 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI-Perjuangan	7	1	8
PKB	4	1	5
Partai Golkar	3	-	3
PPP	3	-	3
PAN	2	1	3
Partai Gerindra	2	-	2
Partai Demokrat	1	-	1
Jumlah/Total	22	3	25

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kota Blitar/Sekretariat of Regional Parliamentry Assembly of Blitar Municipality

Meskipun Kota Blitar dikategorikan sebagai wilayah dengan skor IDG tinggi, tetapi masih terdapat permasalahan kesetaraan gender. Permasalahan tersebut dapat dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan serta persentase keterlibatan perempuan di parlemen yang belum mencapai 30%.

Tindak lanjut yang dilakukan yaitu :

- a) meningkatkan kualitas perempuan di Kota Blitar melalui berbagai program kegiatan peningkatan kapasitas dan advokasi, seperti pelatihan, sosialisasi edukasi, dan lainnya.
 - b) untuk keterlibatan perempuan dalam parlemen, tidak bisa dilakukan intervensi, Dinas P3AP2KB hanya memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan untuk semakin aktif dan memberikan kontribusi untuk pembangunan
2. Indikator kinerja Persentase kelembagaan PUG yang aktif merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Renstra Tahun 2021-2026. Nilai dari Persentase kelembagaan PUG yang aktif tahun 2024 adalah 100% dari target 100%. Jumlah lembaga di Kota Blitar ada 32 dan yang sudah melaksanakan PUG ada 32 lembaga. Lembaga tersebut adalah :
- a) Dharma Wanita Persatuan (DWP)
 - b) Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
 - c) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - d) PC Fatayat NU Kota Blitar
 - e) Persit Kartika Candra Kirana Yonif 511
 - f) Persaudaraan Muslimah (Salimah)
 - g) Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)
 - h) Muslimat NU
 - i) Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
 - j) Persatuan Istri Veteran Indonesia (PIVERI)
 - k) AISIYAH
 - l) Dharma Yukni Karini (Pengadilan Negeri)
 - m) Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0808
 - n) Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)
 - o) Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP)
 - p) Bhayangkari
 - q) Al Hidayah

- r) Persatuan Wanita Indonesia
- s) Himpunan Wanita Karir
- t) Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI)
- u) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- v) Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)
- w) Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia)
- x) Forum Koperasi Wanita (KOPWAN)
- y) LPMK/RW/RT
- z) PPKBD dan Sub PPKBD
- aa) Forum Kota Sehat
- bb) Forum Puspa
- cc) Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia (KKI)
- dd) Kelompok Wanita Tani (KWT)

Pengumpulan dan pengolahan data terpilah menurut jenis kelamin disebut merupakan syarat yang diperlukan untuk berbagai keperluan, utamanya untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Ini sesuai dengan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih adanya perangkat daerah yang belum memahami tentang Pengarusutamaan Gender
- b. Perangkat Daerah sudah melakukan penyusunan PPRG tetapi nominal/target anggaran yang dianalisa belum optimal

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini yaitu :

- a) Adanya regulasi yang digunakan sebagai rujukan dalam mengintegrasikan nilai-nilai PUG yaitu Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
- b) Dukungan /komitmen pimpinan (Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar) dan juga semua Kepala OPD Kota Blitar yang diwujudkan pada budaya kerja di masing-masing bidang untuk menginternalisasikan aspek kesetaraan gender di setiap agenda kebijakan/kegiatan

Tindak lanjut :

- a. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang Pengarusutamaan Gender
- b. Melaksanakan Bimtek Penyusunan PPRG

3. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Renstra Tahun 2021-2026 mencapai nilai 100%, karena setiap kasus kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan di Dinas P3AP2KB selalu diselesaikan 100%. jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ada 16 orang dan yang diselesaikan ada 16 orang.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- a. Belum semua orang memahami tentang Undang-Undang TPKS
- b. Belum semua orang mengetahui keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

- c. Adanya pergantian/perubahan anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Faktor pendukung penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Blitar antara lain yaitu :

- 1) Adanya sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Tim)
- 2) Adanya komunikasi yang baik antar pemberi pelayanan mulai dari pengaduan, pelayanan kesehatan ataupun bantuan hukum sehingga kasus selesai
- 3) Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara intensif

Untuk menjaga tingkat responsif penyelesaian kasus tetap 100% antara lain :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang TPKS
 - b. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c. Meningkatkan kapasitas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Renstra Tahun 2021-2026 mencapai nilai 100%, karena setiap kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Dinas P3AP2KB selalu diselesaikan 100%. jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ada 20 anak dan yang diselesaikan ada 20 anak yang tersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Sananwetan sebanyak 9 anak, Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 8 anak dan yang paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo dengan jumlah 13 anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Anak berhak memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan BPS dan melibatkan K/L terkait telah mengembangkan IPA-IPHA-IPKA sejak tahun 2019. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah ukuran capaian pemenuhan hak anak di Indonesia sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran capaian perlindungan khusus anak di Indonesia.

IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah, disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak.

Faktor pendukung dalam memberikan perlindungan anak khususnya dalam penyelesaian kasus kekerasan anak yaitu :

- a. Adanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Tenaga pendamping/konselor

- c. Adanya partisipasi dari masyarakat (keluarga atau lingkungan yang peduli adanya kasus kekerasan pada anak)

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak untuk penyelesaian kasus kekerasan ini yaitu :

- a. Belum optimalnya Kerjasama dengan Psikolog, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar dan Call Center 112 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- b. Masih terbatasnya kompetensi SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap anak

Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Psikolog, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar dan Call Center 112 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan anak, baik yang datang langsung ataupun melalui Satgas PPA
- b. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang perlindungan anak khususnya dalam pencegahan kekerasan pada anak dengan mengikuti webinar/pelatihan baik di tingkat Kota/Provinsi maupun Nasional; ataupun dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

5. Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur selama masa reproduksi) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana penghitungannya dilakukan setahun sekali pada akhir tahun 2024 oleh BPS. TFR Kota Blitar tahun 2024 adalah sebesar 1.93. Bila dibandingkan dengan TFR Provinsi Jawa Timur yang 1,98 maka Kota Blitar lebih bagus capaiannya.

TFR 1,93 ini mempunyai arti bahwa di Kota Blitar rata-rata perempuan sejak masa usia subur sampai akhir masa reproduksi (usia 15-49 tahun) di Kota Blitar mempunyai anak 2 (dua). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka Jawa Timur yaitu 1,98.

BKKBN menyatakan bahwa tingginya angka prevalensi stunting mempunyai korelasi yang erat dengan angka kesuburan total (TFR) yang tinggi. Semakin tinggi angka TFR, semakin tinggi angka prevalensi stunting. Apabila TFR rendah, maka akan paralel dengan jumlah kasus stunting baru dari kelompok usia bayi baru lahir yang rendah pula.

Kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Rendahnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) muda dalam mengikuti Program KB

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian TFR ini dipengaruhi oleh adanya komitmen dari pemerintah terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; fasilitas pelayanan KB

Tindak lanjut untuk sasaran ini adalah :

Optimalisasi Promosi dan KIE Program KB dengan segmentasi sasaran PUS muda melalui Media Elektronik, Media Sosial, Cetak dan Tatap Muka

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG secara khusus melihat sejauh mana pencapaian pembangunan manusia (yang diukur lewat Indeks Pembangunan

Manusia/IPM). IPG diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu 1) Kesehatan; 2) Pendidikan; 3) Standar hidup yang layak. Realisasi IPG tahun 2022 - 2024 Kota Blitar adalah sebagai berikut :



Faktor yang mendukung IPG di Kota Blitar :

- Peraturan/Kebijakan Pro Gender (Pengarusutamaan Gender)
- Adanya penguatan kapasitas perempuan (pelatihan, pendampingan untuk perempuan terutama di bidang ekonomi)
- Pendidikan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja

Kendala yang dihadapi di Kota Blitar dalam pembangunan gender yaitu :

- Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan pengambil keputusan
- Ketidaksetaraan dalam dunia kerja
- Kurangnya data terpilah gender sehingga sulit merancang kebijakan berbasis data jika tidak ada data spesifik berdasarkan jenis kelamin

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPG di Kota Blitar :

- Dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam organisasi masyarakat, partai politik dan pemerintahan
- Fasilitas tempat kerja ramah perempuan (ruang laktasi, cuti melahirkan, childcare)
- Pengumpulan data terpilah gender untuk semua sektor

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Dimensi Utama dalam IKG yaitu :

- 1) Kesehatan Reproduksi;
 - Angka kematian ibu saat melahirkan
 - Angka kelahiran remaja perempuan (usia 15-19 tahun)
- 2) Pemberdayaan;
 - Proporsi kursi elemen yang dipegang oleh perempuan
 - Tingkat pendidikan menengah keatas pada laki-laki dan perempuan usia 25 tahun keatas
- 3) Partisipasi Ekonomi.
 - Partisipasi angkatan kerja perempuan vs laki-laki

Interpretasi nilai IKG :

Nilai IKG berada di antara 0 dan 1 :

- 0 = kesetaraan sempurna antara laki-laki dan perempuan
- 1 = ketimpangan gender total (semakin tinggi nilainya, semakin timpang)



Faktor pendukung IKG Kota Blitar :

- Edukasi dan akses terhadap alat kontrasepsi serta layanan kesehatan seksual dan reproduksi
- Akses perempuan terhadap pelatihan ketrampilan dan wirausaha

Kendala dalam penurunan IKG di Kota Blitar :

- Rendahnya representasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan (minimnya dukungan partai politik atau sistem rekrutmen yang tidak ramah gender)
- Keterbatasan data terpilah gender

Tindak lanjut :

- Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan kepemimpinan
- Mengembangkan sistem data gender (mengumpulkan dan menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin untuk perencanaan dan evaluasi program)

3. Persentase ARG Daerah

Pada belanja langsung APBD; Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD adalah Rp. 120.045.001.065,00, sedangkan jumlah keseluruhan belanja operasional dan modal APBD adalah Rp. 428.090.673.272,00 sehingga prosentase ARG sebesar 28.04%. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah yang telah melaksanakan PPRG ada 30 lembaga/OPD.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG Pemerintah Kota Blitar tahun Anggaran 2024, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

- Masih terdapat perangkat daerah yang menyusun dokumen PPRG pada level kegiatan dan jumlah sub kegiatan yang disusun PPRGnya relatif sedikit.
- Pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan dokumen PPRG belum optimal, utamanya penyajian data pembuka wawasan, isu kesenjangan gender dan data dasar (base line)
- Masih terdapat dokumen PPRG yang belum disesuaikan dasar hukumnya, utamanya peraturan daerah terbaru terkait pengarusutamaan gender

Tindak lanjutnya adalah :

- a. Menetapkan persentase minimal ARG untuk seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar
- b. Melaksanakan pendampingan kepada Tim Focal Point dalam penyusunan instrumen dan analisa PPRG di Perangkat Daerah
- c. Tim Driver agar mengoptimalkan desk dan verifikasi instrumen PPRG yang disusun oleh Perangkat Daerah.

4. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif.

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ada 29 anak; dan jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) ada 29 anak. Dari 29 anak ini, tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan sebanyak 9 anak, kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 13 anak, dan Kecamatan Sukorejo sebanyak 8 anak.

Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan di Kota Blitar pada tahun 2024 ada 3 lembaga, yaitu 1) P2TP2A yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 50 Blitar; 2) UPPA Polres Blitar Kota, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 17 Blitar; dan 3) Satgas PPA Kota Blitar dimana sekretariatnya beralamat di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

Kendala yang dihadapi : semua kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, sudah ditangani 100%. Sudah disediakan Rumah Aman yang berfungsi untuk tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan/kekerasan seksual dibawah umur. Namun sayangnya keberadaan dan fungsi rumah aman itu sendiri belum dimanfaatkan karena belum ada klien yang memerlukan, sehingga anggaran yang disediakan untuk rumah aman ini belum bisa terealisasi.

Tindak lanjutnya :

- a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP; untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan pelayanan dan pendampingan yang berdasarkan SOP
- b. Peningkatan kualitas SDM di bidang perlindungan anak; mengikuti pelatihan, seminar, workshop baik yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota

5. Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ada 16 orang, jumlah penduduk perempuan ada 80.828 orang. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi di Kota Blitar ada 3 yaitu :

- a. Tim Kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 50 Blita;
- b. UPPA Polres Blitar Kota, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 17 Blitar; dan
- c. Satgas PPA Kota Blitar dimana sekretariatnya beralamat di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

Kader perempuan di Kota Blitar yang sudah dilatih ada 684 orang, yang berada di 3 organisasi, yaitu :

- a. Tim Penggerak PKK, dengan jumlah anggota 614 orang
- b. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota, dengan jumlah anggota 35 orang
- c. Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dengan jumlah anggota 35 orang

Kendala yang dihadapi yaitu :

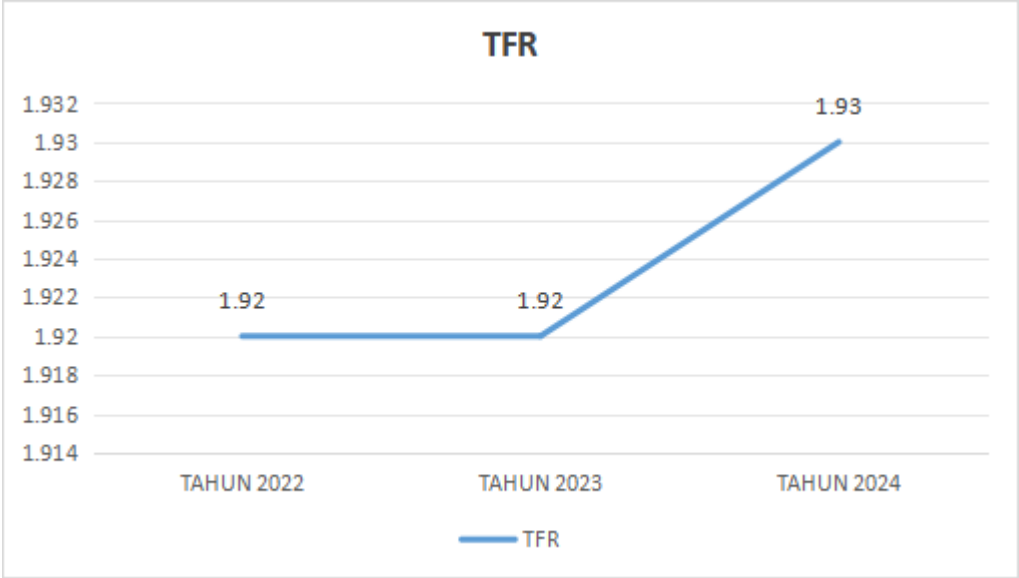
Pelayanan kepada keluarga khususnya dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan masih belum maksimal karena UPT PPA saat ini hanya terdiri dari Kepala UPT saja dibantu dengan tenaga TPL administrasi dan belum memiliki tenaga ahli (psikolog), dan kesadaran masyarakat akan pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya/keluarga/lingkungan sekitar belum optimal;

Tindak lanjut :

- a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP; dalam memberikan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan SOP yang telah ada
- b. Menjaga tingkat responsif penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan lebih mengoptimalkan peran PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) melalui pertemuan dan koordinasi dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, juga dengan lembaga lain
- c. Pembentukan pos curhat di masing-masing kelurahan, mendorong setiap kelurahan untuk mendirikan pos curhat, melalui pertemuan PKK atau setiap pertemuan dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, karena tidak ada anggaran khusus untuk mendirikan Pos curhat di kelurahan

6. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun

TFR Kota Blitar Tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut :



Pada tahun 2024, TFR lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023.

7. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR);

Tingkat pemakaian metode kontrasepsi modern dilakukan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS). Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Jumlah peserta KB modern 13.255 orang, sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur 20.502, sehingga dapat diketahui mCPR nya adalah 64,65%

Kendala : menurunnya tren capaian mCPR dari tahun ke tahun

Tindaklanjut :

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) alat kontrasepsi modern kepada Pasangan Usia Subur
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan dan alat kontrasepsi modern yang berkualitas dan terjangkau
- c. Meningkatkan layanan pasca pemakaian alat kontrasepsi modern khususnya yang menangani masalah kesehatan atau efek samping

8. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Unmet Need adalah istilah dalam bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi yang merujuk pada :

Perempuan usia subur (15-49 tahun) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/ metode kontrasepsi. Unmet Need ini berkaitan dengan tingginya angka kehamilan tidak direncanakan, kematian ibu dan tingkat kemiskinan.

Unmet Need berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama :

- SDG 3 : kesehatan yang baik dan kesejahteraan
- SDG 5 : Kesenjangan gender
- SDG 1 : Pengentasan kemiskinan

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tetapi tidak terlayani tahun 2024 sebanyak 1.685 dengan rincian masing-masing kecamatan yaitu : 334 PUS di kecamatan Kepanjenkidul, 893 PUS di Kecamatan Sukorejo dan 458 PUS di Kecamatan Sananwetan.

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PUS YANG INGIN BER-KB TETAPI TIDAK TERLAYANI DI KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
KECAMATAN KEPANJEN KIDUL			
1	Kepanjenkidul	39	
2	Kepanjenlor	22	
3	Kauman	55	
4	Bendo	94	
5	Tanggung	46	
6	Sentul	65	
7	Ngadirejo	13	
	JUMLAH	334	
KECAMATAN SUKOREJO			
8	Tlumpu	66	
9	Karangsari	94	
10	Turi	138	
11	Blitar	79	
12	Sukorejo	284	
13	Pakunden	121	
14	Tanjungsari	111	
	JUMLAH	893	
KECAMATAN SANANWETAN			
15	Rembang	25	
16	Klampok	52	
17	Plosokerep	43	
18	Karangtengah	63	
19	Sananwetan	131	
20	Bendogerit	13	
21	Gedog	131	
	JUMLAH	458	
	JUMLAH PUS YANG INGIN BER-KB TETAPI TIDAK TERLAYANI KOTA BLITAR	1.685	

Sumber data : Bidang P2KB Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur Kota Blitar Tahun 2024 sebanyak 20,775 dengan rincian sesperti pada tabel berikut :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
KECAMATAN KEPANJEN KIDUL			
1	Kepanjenkidul	755	
2	Kepanjenlor	484	
3	Kauman	768	
4	Bendo	824	
5	Tanggung	998	
6	Sentul	1 105	
7	Ngadirejo	489	
	JUMLAH	5.423	
KECAMATAN SUKOREJO			
8	Tlumpu	570	
9	Karangsari	662	
10	Turi	524	
11	Blitar	598	
12	Sukorejo	1 931	
13	Pakunden	1 613	
14	Tanjungsari	1 423	
	JUMLAH	7.321	
KECAMATAN SANANWETAN			
15	Rembang	418	
16	Klampok	716	
17	Plosokerep	701	
18	Karangtengah	1 027	
19	Sananwetan	1 901	
20	Bendogerit	1 292	
21	Gedog	1 956	
	JUMLAH	8.011	
	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR KOTA BLITAR	20.755	

Sumber data : Bidang P2KB Dinas P3AP2KB Kota Blitar

9. Angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR);

ASFR ini adalah banyaknya jumlah kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu (15-19 tahun). Kegunaan indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil Proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

ASFR 15-19 tahun erat kaitannya dengan pernikahan dibawah umur 20 tahun. Pernikahan pada usia ini dapat beresiko pada kesehatan ibu maupun anak yang dilahirkan.

Jumlah kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ada 13 orang, yang tersebar di 3 kecamatan, Sukorejo ada 4 orang, Kepanjenkidul ada 3 orang dan Sananwetan ada 6 orang. Untuk jumlah perempuan usia 15-19 tahun ada 6.236 orang. Capaian ASFR sejumlah 17,3.

Kendala yang dihadapi yaitu

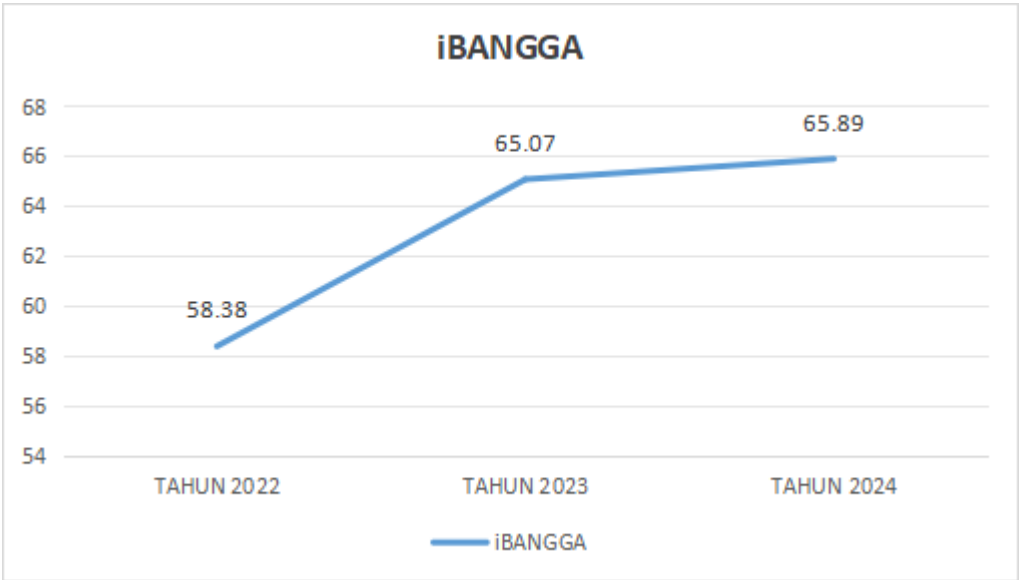
- a. Belum termanfaatkannya secara optimal Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai Penyuluhan KB oleh kelompok remaja dan Keluarga yang memiliki Remaja
- b. Tingkat partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) menurun

Tindak lanjut :

- a. Meningkatkan KIE Kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja melalui jalur sekolah dan kelompok remaja di Kampung KB
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi remaja berbasis teknologi informasi (layanan online peduli remaja)

10. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

iBANGGA merupakan alat ukur untuk melihat tingkat pembangunan gender di tingkat Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Realisasi iBangga Kota Blitar mulai tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut :



Dari grafik diatas dapat diketahui, iBangga Kota Blitar dari tahun 2022 mengalami kenaikan sampai tahun 2024 mencapai 65,89.

Faktor pendukung iBangga :

- Fungsi keluarga sudah tersosialisasi sampai masyarakat lini bawah

Kendala yang dihadapi :

- Pembangunan keluarga melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Koordinasi yang belum optimal antar sektor dapat menghambat efektivitas program

Tindak lanjut :

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengukur efektivitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses penentuan isu-isu penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas Pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi Dinas P3AP2KB di masa datang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai kondisi objektif pada Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka pada penyusunan Renja Tahun 2025 perlu memperhatikan isu-isu penting tugas dan fungsi yang berkembang di Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan organisasi politik.
2. Minimnya ketersediaan dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin di setiap OPD dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
3. Belum maksimalnya pelayanan kepada keluarga khususnya dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan kesadaran akan pelaporan kasus kekerasan yang belum optimal;
4. Belum optimalnya fungsi rumah aman dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
5. Belum idealnya pencapaian “Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern”
6. Disparitas Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) termasuk perkawinan pada usia anak dan remaja
7. Pembangunan Keluarga untuk Membentuk Keluarga yang Berkualitas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema yang diusung dalam rancangan awal RKPD 2026 Kota Blitar adalah “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung Kualitas SDM dan infrastruktur yang berkelanjutan”. Tema ini bersifat jangka pendek tahun 2026 sebagai bagian dari kesinambungan transisi pembangunan. Tema pembangunan tahun 2026 tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas P3AP2KB mendukung prioritas pembangunan ke-2, yaitu Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Serta prioritas pembangunan ke-3 yaitu Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan. Adapun program Dinas P3AP2KB yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas P3AP2KB Tahun 2026 dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026. Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas P3AP2KB sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Blitar	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	35.8% 59.23 %	744,527,094.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Blitar	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	21 % 35.8 % 59.23 %	744.526.350,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase data gender tersaji sesuai standar Persentase Lembaga yang Melaksanakan PUG	100%	67,167,094.00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase data gender tersaji sesuai standar Persentase Lembaga yang Melaksanakan PUG	23 % 100 %	67.166.700,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	9 laporan	24,240,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	9 Laporan	24.240.000,00	
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	60 lembaga	42,927,094.00	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	60 Lembaga	42.926.700,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kota Blitar	Persentase perempuan aktif terlibat dalam pembangunan	-%	289,520,000.00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kota Blitar	Persentase perempuan aktif terlibat dalam pembangunan	23,50 %	289.520.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	1 lembaga	92,920,000.00	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	92.920.000,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	522 orang	196,600,000.00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	522 orang	196.600.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase organisasi/lembaga yang aktif dalam memberikan layanan pemberdayaan perempuan	100%	387,840,000.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase organisasi/lembaga yang aktif dalam memberikan layanan pemberdayaan perempuan	100 %	387.839.650,00	Adanya penyesuaian standard harga
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	21 lembaga	64,640,000.00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	21 Lembaga	64.640.000,00	
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Blitar	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	814 orang	323,200,000.00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kota Blitar	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	814 orang	323.199.650,00	Adanya penyesuaian standard harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Blitar	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	100%	125,136,907.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Blitar	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	14.62 Rasio	125.132.500,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 lembaga	34,473,078.00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 lembaga	34.472.900,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	300 lembaga	34,473,078.00	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	300 Lembaga	34.472.900,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	49,215,530.00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	49.211.600,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	18 orang	49,215,530.00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	18 orang	49.211.600,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	1 lembaga	41,448,299.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	2 lembaga	41.448.000,00	Adanya penyesuaian standard harga dan jumlah lembaga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 dokumen	41,448,299.00	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 Dokumen	41.448.000,00	Adanya penyesuaian standard harga
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Blitar	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	100%	80,800,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Blitar	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	3 puspaga	80.800.000,00	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan puspaga sesuai standar	100 keluarga	80,800,000.00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan puspaga sesuai standar	100 keluarga	80.800.000,00	
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kota Blitar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang %	80,800,000.00	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kota Blitar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	80.800.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Blitar	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	68,96 %	125,240,000.00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Blitar	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	68.96 %	125.240.000,00	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Blitar	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak	2 lembaga	60,600,000.00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Blitar	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak	2 lembaga	60.600.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga	60,600,000,000.00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	60.600.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	100%	64,640,000.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	100 %	64.640.000,00	
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 lembaga	64,640,000.00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	64.640.000,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Blitar	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	0 indeks 6.3 nilai	164,730,537.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Blitar	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	6.3 nilai 85.41 indeks	164.730.500,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kota Blitar	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	0 lembaga	59,385,737.00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kota Blitar	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	48 lembaga	59.385.700,00	Adanya penyesuaian standard harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Blitar	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	59,385,737.00	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Blitar	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	4 Dokumen	59.385.700,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	32,320,000.00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	32.320.000,00	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	32,320,000.00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang	32.320.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase SDM perlindungan dan penanganan AMPK yang mempunyai sertifikat	20%	73,024,800.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase SDM perlindungan dan penanganan AMPK yang mempunyai sertifikat	20 %	73.024.800,00	
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	200 orang	73,024,800.00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	200 Orang	73.024.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kota Blitar				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kota Blitar				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	89 indeks	4,543,697,676.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %	4.543.701.864,00	Adanya penyesuaian standard harga dan penambahan sub kegiatan baru
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	12,355,800.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	41.454.800,00	Adanya penambahan aktivitas dan belanja makan minum
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1,125,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.250.000,00	Adanya penambahan belanja makan minum kegiatan dan pemecahan dokumen perencanaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	4,500,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	12.500.000,00	Adanya penambahan aktivitas dan belanja makan minum
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	0	0.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	109 Data	1.375.000,00	Penambahan sub kegiatan baru

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah								
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5,605,800.00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	11.704.800,00	Adanya penyesuaian standard harga dan belanja makan minum
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 dokumen	1,125,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	9.750.000,00	Adanya penyesuaian standard harga dan belanja makan minum
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0	0	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.875.000,00	Penambahan sub kegiatan baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3,325,693,349.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.325.693.349,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	3,322,693,349.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	3.322.693.349,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 laporan	3,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 Laporan	3.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	4.250.000,00	Penambahan sub kegiatan baru
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	4.250.000,00	Penambahan sub kegiatan baru
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	93,871,800.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	91.930.900,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	27,800,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	36.246.000,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	265 orang	66,071,800.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	265 Orang	55.684.900,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	188,604,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	187.712.900,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,987,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.986.900,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	23,993,400.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.993.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	14,668,100.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	14.684.600,00	Adanya penyesuaian standard harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	15,137,500.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.250.000,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,060,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	18.060.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,754,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.754.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	100.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4,984,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.984.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	135,600,200.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	145.881.700,00	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	0.00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4.661.600,00	Penambahan sub kegiatan baru
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	135,600,200.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	141.220.100,00	Adanya penyesuaian standard harga dan jumlah unit/mesin yg dibelanjakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	355,612,500.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	359.152.415,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	36 laporan	87,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	36 Laporan	90.539.960,00	Adanya penyesuaian standard harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	268,612,500.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	268.612.455,00	Adanya penyesuaian standard harga
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	431,960,027.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	387.625.800,00	Adanya pengurangan pagu anggaran dan penambahan sub kegiatan baru
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29.357.100,00	Penambahan sub kegiatan baru
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	115,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	93.292.900,00	Adanya pengurangan pagu anggaran karena penyesuaian standard harga
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit%	39,780,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	57.975.800,00	Penambahan pagu anggaran karena penyesuaian standard harga
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 unit	277,180,027.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	207.000.000,00	Adanya penyesuaian standard harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Blitar	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate)	16.95 kelahiran	71,089,400.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Blitar	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate)	16.95 kelahiran	71.089.400,00	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Blitar	Persentase Remaja usia 15-19 tahun yang terpapar pendidikan kependudukan	23 %	14,527,400.00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Blitar	Persentase Remaja usia 15-19 tahun yang terpapar pendidikan kependudukan	23 %	14.527.400,00	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Blitar	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 kegiatan	1,000.00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Blitar	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	10 Kegiatan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1,000.00	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kota Blitar	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	14,525,400.00	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kota Blitar	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	14.525.400,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Kota Blitar	Persentase data dan informasi kependudukan	100%	56,562,000.00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Kota Blitar	Persentase data dan informasi kependudukan yang tersedia	100 %	56.562.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		yang tersedia tepat waktu dan sesuai standar			Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		tepat waktu dan sesuai standar			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 laporan	1,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3 dokumen	40,400,000.00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3 Dokumen	40.400.000,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 laporan	1,000.00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	16,160,000.00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	16.160.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Blitar	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	68.74 % 7,9%	270,694,000.00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Blitar	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	68.5 % 8.1 %	270.695.000,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Blitar	Persentase organisasi/Stakeholder dan Mitra Kerja yang terpapar Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	78%	6,000.00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Blitar	Persentase organisasi/Stakeholder dan Mitra Kerja yang terpapar Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	78 %	6.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 laporan	1,000.00	Pengendalian Program KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 unit	1,000.00	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Unit	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 laporan	1,000.00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 dokumen	1,000.00	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Blitar	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 dokumen	1,000.00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Blitar	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 organisasi	1,000.00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	10 Organisasi	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Persentase SDM KB yang berdayaguna	100%	242,401,000.00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Persentase SDM KB yang berdayaguna	100 %	242.401.000,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	417 orang	242,400,000.00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	417 Orang	242.400.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 laporan	1,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase akseptor yang terlayani KB	88%	28,285,000.00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase akseptor yang terlayani KB Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)	88 %	28.285.000,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan	4 laporan	1,000.00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	4 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	552 orang %	1,000.00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	552 Orang	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	9 unit	1,000.00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	9 Unit	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	250 orang	1,000.00	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	250 Orang	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 laporan	1,000.00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Blitar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	20 orang	28,280,000.00	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Blitar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25 Orang	28.280.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Blitar	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan pemberdayaan pelaksanaan Program Bangsa Kencana	45%	2,000.00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Blitar	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan pemberdayaan pelaksanaan Program Bangsa Kencana	45 %	3.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah DASHAT di Kampung KB	10 unit	1,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah DASHAT di Kampung KB	10 Unit	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 kampung	0.00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Kampung	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3 dokumen	1,000.00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3 Dokumen	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Blitar	persentase keluarga yang aktif mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	35%	304,622,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Blitar	persentase keluarga yang aktif mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	55.01 %	304.622.000,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan keluarga yang terbentuk	156 kelompok	304,620,000.00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan keluarga yang terbentuk	156 kelompok	304.620.000,00	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 laporan/dokumen	1,000.00	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 Laporan / Dokumen	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	4 laporan	281,588,000.00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	4 Laporan	281.588.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	56 unit	1,000.00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	56 Unit	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	150 laporan	23,028,000.00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	150 Laporan	23.028.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 laporan	1,000.00	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	156 kelompok	1,000.00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	156 Kelompok	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Persentase keluarga berisiko stunting yang didampingi	40 %	2,000.00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Persentase keluarga berisiko stunting yang didampingi	40 %	2.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Blitar	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3 ;laporan	1,000.00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Blitar	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3 laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Blitar	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3 laporan	1,000.00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Blitar	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3 laporan	1.000,00	Anggaran sumber dana DAK-BOKB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sesuai hasil analisis terdapat beberapa subkegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif dari Rancangan Awal RKPD yang sebagian besar dikarenakan ada penyesuaian standard harga. Selain itu untuk subkegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB masih belum mendapatkan alokasi anggaran dari Pusat sehingga pagu anggaran di subkegiatan tersebut akan mengalami perubahan setelah ada transfer DAK BOKB.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil telaah hibah, musrenbanng dan pokok-pokok pikiran DPRD. Pada penyusunan Renja 2026, terdapat usulan Pokok Pikiran DPRD dan tidak terdapat usulan hibah.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Blitar

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
1	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan Kepannjen kidul	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	40	Orang	

Sumber: Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS P3AP2KB KOTA BLITAR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia yang didukung kabupaten dan kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2026, Pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2026 yaitu **Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif** pembangunan nasional diarahkan pada arah kebijakan yang meliputi :

1. Swasembada Pangan, Energi dan Air
2. Pendidikan dan Kesehatan
3. Deregulasi dan Kepastian Hukum
4. Adopsi Teknologi dan Inovasi
5. Pertahanan Semesta
6. Fiscal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi
7. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
8. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Adapun prioritas pembangunan nasional meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan**

Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”. Adapun tujuan yang menjadi acuan Pembangunan Daerah Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Pengurangan Ketimpangan;
3. Terwujudnya Perluasan Lapangan Kerja dan Konektivitas Wilayah untuk Penguatan Ekonomi;
4. Meningkatnya SDM yang Berkualitas;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif;
6. Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan serta Meningkatnya Kedaulatan Pangan;
7. Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis, Toleran dan Inklusif;
8. Terwujudnya kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Sedangkan arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga Kesehatan dan Pendidikan
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, serta kehutanan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya
4. Peningkatan jaringan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif
5. Penguatan peran kawasan metropolitan terintegrasi dengan kawasan agropolitan, kawasan industri dan gugusan kawasan pegunungan.
6. Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
7. Peningkatan preservasi dan konservasi pada kawasan lindung dengan prinsip pelestarian geodiversity, biodiversity, culture diversity dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
8. Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.
9. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
10. Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, sebagai bentuk nilai tambah sinergitas, disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi perubahan iklim.
11. Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan

terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

12. Harmonisasi dan penyelarasan pengembangan wilayah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Bali melalui kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan penyediaan sarana prasarana.
13. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (WP3K) bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah melalui integrasi konektivitas pada tujuh koridor pengembangan wilayah.

Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 antara lain adalah :

1. Jatim Sejahtera – Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Jatim Kerja - Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
3. Jatim Akses - Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. Jatim Cerdas - Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
5. Jatim Sehat - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).
6. Jatim Berkah-Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
7. Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.
8. Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan
9. Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026, Dinas P3AP2KB berpartisipasi dalam mewujudkan prioritas ke 8 yaitu **Jatim Harmoni** - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya,

isu - isu strategis pembangunan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang, pokok pokok pikiran DPRD serta arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 berpedoman pada tema pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 pada tahun 2026. Tema RKPD Kota Blitar Tahun 2026 harus diselaraskan dengan tema rencana pembangunan nasional dan provinsi di tahun berkenaan. Tema RKPD Kota Blitar Tahun 2026 adalah **“Penguatan Pondasi Transformasi bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan”** dengan fokus pada meningkatnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan, revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, ekonomi yang tangguh dan inklusif dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tema pembangunan Kota Blitar tahun 2026 sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”** dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi, SDM berkualitas, tata kelola pemerintahan yang adaptif, meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan serta kedaulatan pangan.

Selaras pula dengan tema pembangunan nasional yaitu : **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** dengan fokus pada Swasembada Pangan, Energi dan Air, Pendidikan dan Kesehatan, Deregulasi dan Kepastian Hukum, Adopsi Teknologi dan Inovasi, Pertahanan Semesta, Fiskal Adaptif, Stabilitas Makro Ekonomi, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Visi pembangunan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana yang tertuang RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 adalah **“Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”**. Terdapat empat poin visi yaitu Maju, Sehat dan Sejahtera serta Kota Masa Depan. Keempat poin visi ini bersifat luas yang mencakup berbagai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata kehidupan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditopang oleh penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi Pertama: Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis.

Misi Kedua: Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia

Misi Ketiga: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*

Misi Keempat: Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter

Misi Kelima: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Visi Misi Pembangunan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana yang tertuang RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029, maka Dinas P3AP2KB mendukung misi pembangunan :

- a) *Misi Kedua:* Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia; indikatornya Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

dan sasarannya adalah meningkatkan kualitas Ketahanan Keluarga dengan indikator Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

- b) *Misi Keempat*: Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter, dengan Tujuan Pembangunan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan sasaran Pembangunannya adalah Meningkatnya kesetaraan gender; dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan dan inklusivitas. Pembangunan tersebut harus merata, adil dan dapat mencakup semua kalangan masyarakat, serta dapat mengakomodasi suara dari kelompok-kelompok rentan. Pemberian kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan kebijakan yang representatif dan inklusif. Oleh karenanya, dengan mendorong perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, akan mendorong perubahan tatanan, kehidupan menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan manusia, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan individu saja, namun juga harus melalui pendekatan keluarga. Secara garis besar masih ada bias gender dalam kehidupan keluarga terutama ketertinggalan berbagai aspek berada di pihak perempuan, anak dan lansia perempuan. Dapat dikatakan sangatlah relevan dan penting mengintegrasikan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga yang terkait dengan pendekatan teori struktural fungsional dan teori sistem.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026-2027

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
1	Tujuan : Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Capaian IPG berdasarkan berita resmi statistik nasional (Permendagri 67/2011 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah)	IPG=(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100% IPM Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus berdasarkan capaian perempuan IPM Laki-laki: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan capaian laki-laki Indeks Pembangunan Manusia, mencakup: - Kesehatan (Umur Harapan Hidup saat Lahir) - Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah) - Standar Hidup Layak (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan/PPP)	Indeks	97,8	97,52	97,59	97,64
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya yang dilakukan dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan bentuk lain penyalahgunaan	IPA = (0,2 X skor kebijakan dan peraturan) + (0,3 x skor layanan perlindungan anak) + (0,2 x skor partisipasi masyarakat) + (0,3 x skor kapasitas dan sumber daya)	Indeks	70,57	70,82	71,98	73,42
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.	Penghitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut: $IPBK = \sqrt[5]{D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5}$ Atau rumus menggunakan Excel $IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5)^{(1/5)}$ D1 : Partisipasi D2 : Keberlanjutan D3 : Pemihakan D4 : Integrasi D5 : Kesetaraan	Indeks	71,9	72	72,34	72,77

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
	Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPak perempuan	1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right) \times (PR_p \times SE_p)} \times TPAK_p$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PR_l \times SE_l)} \times TPAK_l$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_l) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_l)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_l}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_l \times SE_l} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,l} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$	Indeks	0,198	0,195	0,198	0,196
		Predikat Penganugerahan Parahita	Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Indonesia yang diberikan	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) diberikan kementerian PPPA RI pada tahun berjalan (tahun N). Pemberian predikat ini diberikan setiap 2 tahun sekali sehingga predikat PPE pada tahun 2026,	Nilai	550	550	651	651

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
			kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya yang dinilai berhasil dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. PPE merupakan instrumen evaluasi dan penghargaan nasional terhadap komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, serta hasil capaian pembangunan yang responsif gender.	2028, 2030 menggunakan predikat tahun sebelumnya (tahun N-1)					
		Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomer 12 tahun 2022	Predikat Kota Layak Anak (KLA) diberikan oleh kementerian PPPA RI pada tahun berjalan (tahun N). Pemberian predikat ini diberikan setiap 2 tahun sekali sehingga predikat PPE pada tahun 2026, 2028, 2030 menggunakan predikat tahun sebelumnya (tahun N-1)	Nilai	745	837,49	862,61	888,49
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas keluarga	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun adalah Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya	$TFR = \sum (ASFR \text{ kelompok usia}) \times 5$ Dimana ASFR adalah tingkat kelahiran spesifik umur kelompok usia z. 5 adalah interval/rentang usia yang digunakan dalam perhitungan	Rata-rata anak per wanita	1,94	1,93	1,93	1,93
		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan	iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi	Indeks	65,89	65,96	66,23	66,54

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
			peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).	diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3. D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2, ..., 6. D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j= 1, 2, ..., 7. D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1, 2, ..., 4.					
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.	Indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: $indeks = \sum_{i=1}^8 (w_i V_i)$ dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator. V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir.	Indeks	91,2	91,4	91,6	92

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
				V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja. V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta). V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).					
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan	Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari; - Dimensi Emosional: a. Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut);	Indeks	55,3	55,8	56	56,5

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
				b. Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut); c. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut); d. Kekerasan dalam rumah tangga - Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL); - Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP; - Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja; - Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. - Rumus : $indeks = \sum_{i=1}^7 (w_i D_i)$ <i>Di</i> : dimensi ke- <i>i</i>, dan <i>wi</i> : bobot ke- <i>i</i>; dimana <i>i</i> = 1,2, ... , 7. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah <i>w1</i> = 0,1; <i>w2</i> = 0,1; <i>w3</i> = 0,2; <i>w4</i> = 0,1; <i>w5</i> = 0,25; <i>w6</i> = 0,15; dan <i>w7</i> = 0,1. <i>D1</i> : dimensi spiritual (<i>Sp</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. <i>D2</i> : dimensi intelektual (<i>In</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan terakhir minimal SLTP. <i>D3</i> : dimensi fisik (<i>Fs</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarganya makan “makanan beragam” (makanan					

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
						2024	2025	2026	2027
				pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. D4 : dimensi emosional (Es), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang tidak terdapat konflik diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga). D5 : dimensi sosial kemasyarakatan (SK), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia(, adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) D6 : dimensi vokasional (PV), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja. D7 : dimensi lingkungan (Lk), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik/tangguh lansianya.					
	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per umur x (0,11) Nilai per unsur = jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	Indeks	88,46	88,65	88,90	89,00

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN

Misi : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) • Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi • Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Menurunkan rasio kekerasan terhadap perempuan	• Pencegahan kekerasan terhadap perempuan • Peningkatan ketersediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan • Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan	Program Perlindungan Perempuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Meningkatkan peran serta lembaga dalam pemenuhan hak anak	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha - Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	- Pencegahan kekerasan terhadap anak - Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	Program Perlindungan Khusus Anak
	Meningkatnya kualitas keluarga	Pengendalian pertambahan jumlah penduduk	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk
		Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pembinaan KB	- Pelaksanaan advokasi, KIE sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB - Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			• Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	
		Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	• Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Capaian IPG berdasarkan berita resmi statistik nasional (Permendagri 67/2011 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah)	IPG=(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100% IPM Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus berdasarkan capaian perempuan IPM Laki-laki: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan capaian laki-laki Indeks Pembangunan Manusia, mencakup: - Kesehatan (Umur Harapan Hidup saat Lahir) - Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah) - Standar Hidup Layak (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan/PPP)	Indeks	97,8	97,52	97,59	97,64

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPak perempuan	- Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki$G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0.005}{MTF} \cdot \frac{0.01}{MHPK20}\right) \cdot (PR_F \cdot SE_{F1/2}) \cdot TPAK_F}$ - Menghitung agres indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic$G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_{M1/2}) \cdot TPAK_M}$ $GII = 1 - \sqrt[3]{(Empowerment) \times (Reproductive Health) \times (Labor Market)}$ - Menghitung indeks masing-masing dimensi$HARM (G_F, G_M) = \left[\frac{(G_F)^{-1} + (G_M)^{-1}}{2} \right]$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0.005}{MTF} \cdot \frac{0.01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$IP = \frac{(\sqrt{PR_F \cdot SE_F} + \sqrt{PR_M \cdot SE_M})}{2}$$IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$ - Menghitung agres indeks dimensi dengan rata-rata geometrik$G_{F,M} = \sqrt[3]{IKR \cdot IP \cdot IPK}$ - Menghitung Indeks Kesetaraan Gender$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM (G_F, G_M)}{G_{F,M}}$ - Menghitung Indeks Ketimpangan Gender$IKG = 1 - \frac{HARM (G_F, G_M)}{G_{F,M}}$	Indeks	0,198	0,195	0,175	0,170

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah jumlah anggaran pada seluruh perangkat daerah yang akan dialokasikan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran)/DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan untuk mengatasi kesenjangan gender (yang sudah dilakukan analisis) yang tertuang dalam dokumen GBS (Gender Budgeting Statement) yang ditandatangani oleh Kepala OPD	(Anggaran yang di analisa/total apbd (setelah dikurangi belanja rutin) * 100%)	Persentase			31,81	31,82
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) karena kondisi atau situasi (korban kekerasan, penelantaran dan eksploitasi) yang mendapat layanan perlindungan, kesehatan, pendidikan dan dukungan operasional pada tahun berjalan	[Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus] x 100%	Persentase	100	100	100	100
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Definisi operasional perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merujuk pada kriteria spesifik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan seorang perempuan sebagai korban dari kedua bentuk kejahatan tersebut, berdasarkan pada tindakan yang dialami, dampak yang dirasakan, dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.	[Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO] x 100%	%	100	100	100	100

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
6	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun adalah Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya	TFR= $\sum$ (ASFR kelompok usia) $\times$ 5 Dimana ASFR adalah tingkat kelahiran spesifik umur kelompok usia z. 5 adalah interval/rentang usia yang digunakan dalam perhitungan	Rata-rata anak per wanita	1,94	1,93	1,93	1,93
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase wanita kawin usia 15–49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun	Formulasi Perhitungan Unmet Need KB : 1. Indentifikasi PUS yang memenuhi kriteria - PUS yang tidak hamil dan tidak ingin punya anak lagi (unmet need for limiting) - PUS yang tidak hamil dan ingin menunda kehamilan (unmet need for spacing) - PUS yang sedang hamil dan ingin menunda atau mengakhiri kehamilan (termasuk dalam unmet need) 2. Hitung jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi - Jumlahkan PUS yang memenuhi kriteria di point 1 dan tidak menggunakan kontrasepsi 3. Hitung Total PUS - Jumlahkan semua PUS dalam kelompok usia subur (15-49 tahun) yang terdata 4.Hitung Prosentase Unmet Need - % Unmet Need = (jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi (poin 2)/Total PUS (poin 3)) *100%	%	8,11		8,09	8,07

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
8	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 adalah angka kelahiran hidup per 1.000 perempuan di kelompok usia 15-19 tahun dalam periode tertentu	$\left[\text{ASFR} \right] (15-19) = \frac{K_{(15-19)}}{P_{(15-19)}} \times 1000$	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	17,30		17,10	16,75
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).	iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan: : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3. D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2, ..., 6.	Indeks	65,89	65,96	66,23	66,54

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
			D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j= 1, 2, ..., 7. D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1, 2, ..., 4.					
10	Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) adalah Proporsi (persentase) wanita kawin usia 15–49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern pada saat data dikumpulkan	[Banyaknya Peserta KB aktif modern / Banyaknya pasangan usia subur] x 100% (PUS) PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	%	64,75		64,95	65

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 Dinas P3AP2KB disusun berdasarkan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan Dinas P3AP2KB, tindak lanjut LKjIP dan sebagainya. Terdapat 9 Program, 26 Kegiatan dan 65 Sub kegiatan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan rutin setiap tahun
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
3. Program dan kegiatan yang sudah ada di juknis dana khusus (DAK BOKB)

Pada tahun 2026, Dinas P3AP2KB membutuhkan total anggaran Rp. 6.430.537.614,00 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum : Rp. 6.430.537.614,-
2. Dana Alokasi Khusus : Rp. 0,-,-
 - A. DAK Non Fisik BOKB : Rp. 0,-
 - B. DAK fisik BOKB : Rp. 0,-

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Mendukung sasaran Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang terintegrasi
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Tupoksi

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung Tupoksi

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung Tupoksi
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Mendukung sasaran Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data gender tersaji sesuai standar Persentase Lembaga yang Melaksanakan PUG	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif terlibat dalam pembangunan	

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	2	08	02	2.02	0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Pokir
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi/lembaga yang aktif dalam memberikan layanan pemberdayaan perempuan	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	
	2	08	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	Mendukung sasaran Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	
	2	08	03	2.03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Mendukung sasaran Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan puspaga sesuai standar	
	2	08	04	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Mendukung sasaran Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	
6	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Mendukung sasaran Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM perlindungan dan penanganan AMPK yang mempunyai sertifikat	
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
7	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate)	Mendukung sasaran Meningkatnya pengendalian penduduk
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Remaja usia 15-19 tahun yang terpapar pendidikan kependudukan	
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu dan sesuai standar	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
8	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Mendukung sasaran Meningkatnya pengendalian penduduk
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase organisasi/Stakeholder dan Mitra Kerja yang terpapar Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Mendukung penurunan stunting
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tindaklanjut LKJIP
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase SDM KB yang berdayaguna	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana	

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
						Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akseptor yang terlayani KB	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan pemberdayaan pelaksanaan Program Bangga Kencana	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Mendukung penurunan stunting
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
9	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase keluarga yang aktif mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Mendukung sasaran Meningkatnya pengendalian penduduk
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan keluarga yang terbentuk	

	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Mendukung penurunan stunting
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	
	2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga berisiko stunting yang didampingi	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Mendukung penurunan stunting

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan DP3AP2KB Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029, telaahan kebijakan nasional, hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2026, telaahan usulan kegiatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026 serta didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Dinas P3AP2KB Tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas P3AP2KB Tahun 2024 pada Renja
Dinas P3AP2KB Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :		
	Mengadakan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan utamanya di bidang ekonomi	Mengadakan pelatihan makanan olahan pada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), Workshop IT bagi PEKKA, SEKOPER (sekolah Perempuan)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Kelembagaan PUG yang aktif :		
	Mengadakan sosialisasi PUG dan fasilitasi Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak	Sosialisasi PUG pada organisasi dan lembaga masyarakat, Bimtek PPRG; Fasilitasi Pembentukan DKRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak); Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penganugerahan Parahita Ekapraya	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan :		
	a. Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan SOP yang telah ada	Pertemuan anggota Satgas PPA; Layanan UPT PPA (Layanan penjangkauan dan pendampingan korban; Layanan spesifik pemulihan korban); Layanan Rumah Perlindungan (Rumah Aman)	Program Perlindungan Perempuan; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota; Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
	b. Untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Sosialisasi Pencegahan KtP (Kekerasan terhadap Perempuan)/TPPO(Tindak Pidana Perdagangan Orang)/KDRT	Program Perlindungan Perempuan; Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Peningkatan Kapasitas Satgas PPA 3. Optimalisasi Pos Curhat di masing-masing kelurahan (Tidak ada anggaran khusus, tetapi selalu memberikan motivasi kepada Satgas PPA Kelurahan)	Program Perlindungan Perempuan; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak :		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	a. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan pelayanan dan pendampingan yang berdasarkan SOP	1. Pelayanan UPTD PPA (Layanan spesifik untuk pemulihan korban; pendampingan dan penjangkauan/ mediasi; layanan pendampingan tenaga ahli) 2. Layanan Rumah Perlindungan (Rumah Aman) 3. Layanan Pengaduan dan informasi UPT PPA	<i>Program Perlindungan Khusus Anak;</i> <i>Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ Kota;</i> <i>Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota</i>
	b. Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM di bidang Perlindungan Anak dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop baik yang diadakan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Khusus Anak; Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat/anak-anak dalam pencegahan kekerasan	Fasilitasi Edukasi dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di sekolah, Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak kepada masyarakat	<i>Program Perlindungan Khusus Anak;</i> <i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota;</i> <i>Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</i>
5	Total Fertility Rate (TFR) :		
	a. Inovasi dan meningkatkan kerjasama dengan institusi sekolah	Workshop Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	<i>Program Pengendalian Penduduk;</i> <i>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;</i> <i>Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur</i>

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			<i>Nonformal</i>
	b. Peningkatan kapasitas kader dalam program KB	Pembinaan kader dan Pokja IMP, pemberian insentif/jasa pelayanan kader PPKBD dan Sub PPKBD	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	c. Refreshing Penyuluh KB dan kader terkait Kontrasepsi dan Penggerakan Masyarakat untuk ber KB;	Workshop pendidikan teman sebaya dan Rakor Saka Kencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera; Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana berikut :

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan								
	2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	5 Laporan			1 Laporan	24.240.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	OPD se Kota Blitar dan Lembaga Lainnya	1 Laporan	27.500.000,00					
	2	0	0	2.0	001	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	350 Lembaga			60 Lembaga	42.926.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	OPD se Kota Blitar dan Lembaga Lainnya	70 Lembaga	50.000.000,00	DP3AP2KB				
	2	0	0	2.0		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Persentase perempuan aktif terlibat dalam pembangunan	23,52 %			23,48 %	289.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan	Perempuan kepala keluarga (PEKKA)	23,49%	305.000.000,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kota Blitar, Organisasi Wanita			
	208	002	2.02	0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							1 Lembaga	92.920.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Perempuan kepala keluarga (PEKKA) Kota Blitar, Organisasi Wanita	1 Lembaga	110.000.000,00	DP3AP2KB
	208	002	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							522 orang	196.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Perempuan kepala keluarga (PEKKA) Kota Blitar, Organisasi Wanita	522 orang	195.000.000,00	DP3AP2KB
	208	002	2.03				100 %	387.839.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	PKK dan GOW Kota Blitar	100%	470.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kabupaten/Kota	perempuan								olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan				
	2	0	0	2.0	000	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	105 Lembaga	21 lembaga	21 lembaga	21 Lembaga	64.640.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	21 Lembaga	75.000.000,00	DP3AP2KB
	2	0	0	2.0	001	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	4070 orang	814 orang	814 orang	814 orang	323.199.650,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas	PKK se-Kota Blitar	814 orang	395.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan				
2	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	14,54 Rasio			14,62 Rasio	125.132.500,00						14,6 Rasio	129.000.000,00	
	2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	20 lembaga			4 lembaga	34.472.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga perlindungan perempuan	4 lembaga	40.000.000,00	
	2	0	0	2.0	000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan	1500 Lembaga			300 Lembaga	34.472.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat	Lembaga perlindungan perempuan	300 Lembaga	40.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota						Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan								
	2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%			100 %	49.211.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Perempuan Korban Kekerasan di Kota Blitar	100%	85.000.000,00					
	2	0	0	2.0	000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang	110 orang			18 orang	49.211.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Perempuan Korban Kekerasan	22 orang	85.000.000,00	DP3AP2KB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota						tan, Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	n di Kota Blitar			
	2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	1lembaga			2 lembaga	41.448.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Instansi Vertikal, Organisasi dan Lembaga Masyarakat	1lembaga	4.000.000,00	
	2	0	0	2.0	000	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	14 Dokumen			2 Dokumen	41.448.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan	Instansi Vertikal, Organisasi dan Lembaga Masyarakat	3 Dokumen	4.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas Pendidikan dan Kesehatan				
3	2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	3 puspa ga			3 puspaga	80.800.000,00						3 puspaga	90.000.000,00	
	2	0	0	2.0		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan puspaga sesuai standar	522keluarga			100 keluarga	80.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Puspaga	108keluarga	90.000.000,00	
	2	0	0	2.0	000	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.														
							Jumlah pengambil	1450			250	80.800.000,00	Kota	PENDAPA	Memperkuat pembangunan	JATIM HARMONI	Puspaga	400	90.000.000,00	DP3AP2K

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			Orang		Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TAN ASLI DAERAH (PAD)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan		Orang		B	
4	2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	68,96 %			68,96 %	125.240.000,00						68,96 %	145.000.000,00		
	2	0	0	2.0		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak	22lembaga			2 lembaga	60.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Kota Layak Anak, Anak Sekolah	4lembaga	70.000.000,00		
	2	0	0	2.0	000	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat	22 Lembaga			2 Lembaga	60.600.000,00	Kota Blitar, Semua	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Lembaga Kota Layak	4 Lembaga	70.000.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Anak, Anak Sekolah				
	2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	100%			100 %	64.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Forum Anak, Anak Sekolah	100%	75.000.000,00		
	2	0	0	2.0	000	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
							jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	50 Lembaga			10 Lembaga	64.640.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Forum Anak, Anak Sekolah	10 Lembaga	75.000.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan							tan, Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan				
5	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	5,34 Rasio 92,42 indeks			6,23 Rasio 85,41 indeks	164.730.500,00						6,01 Rasio 87,12 indeks	185.000.000,00	
	2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100%			48 lembaga	59.385.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Satgas PPA	100%	70.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															disabilitas.					
	2008	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota															
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	20 Dokumen			4 Dokumen	59.385.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Satgas PPA	4 Dokumen	70.000.000,00	DP3AP2KB
	2008	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	100%			100 %	32.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Anak se-Kota Blitar	100%	37.000.000,00		
	2008	07	2.01	0006	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		8	7	2	8															
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	166 Orang			30 Orang	32.320.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Anak se-Kota Blitar	33 Orang	37.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM perlindungan dan penanganan AMPK yang mempunyai sertifikat	40%			20 %	73.024.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok PATBM, Anak Sekolah	30%	78.000.000,00	
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan	1120 Orang			200 Orang	73.024.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Kelompok PATBM, Anak Sekolah	230 Orang	78.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
									tan, Semua Kel/Des a		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan							
	214				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.190.108.264,00							7.271.548.976,00				
6	2141				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %			100 %	4.543.701.864,00				100 %	6.401.048.976,00			
	21411	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			100 %	41.454.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN Dinas P3AP2KB	100%	33.000.000,00	
	214111	2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16		17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			2 Dokumen	4.250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN Dinas P3AP2KB	3 Dokumen	2.500.000,00		DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan			9 Laporan	12.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN Dinas P3AP2KB	9 Laporan	5.500.000,00		DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah				109 Data	1.375.000,00	Kota Blitar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya	JATIM HARMONI Menjaga	ASN Dinas P3AP2KB		2.500.000,00		DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan					
	2	1	0	2.0	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara			1 Berita Acara	11.704.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN Dinas P3AP2KB	1 Berita Acara	7.500.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang	65 Dokumen			13 Dokumen	9.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis	ASN Dinas P3AP2KB	13 Dokumen	12.500.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							disusun						Semua Kel/Desa		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan					
	2	1	0	2.0	001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan															
		4	1	1	3		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	1.875.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN Dinas P3AP2KB		2.500.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%			100 %	3.325.693.349,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan	ASN & Pegawai Non ASN DP3AP2KB	100%	4.235.548.976,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	dan Kesehatan								
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan			300 Orang/bulan	3.322.693.349,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN & Pegawai Non ASN DP3AP2KB	25 Orang/bulan	4.225.548.976,00	DP3AP2KB				
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				19 Laporan	3.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	ASN & Pegawai Non ASN DP3AP2KB		10.000.000,00	DP3AP2KB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							SKPD								penyanggandisabilitas.					
	2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	-			100 %	4.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	-	0,00	
	2	1	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	4.250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN PEREMPUAN, PERLINGGUGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2.0		Administrasi	Persentase	100%			100 %	91.930.900,00			Memperkuat	JATIM	Karyawan	100%	210.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	1	5		Kepegawaian Perangkat Daerah	pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar							pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	- karyawati DP3AP2KB				
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		4	1	5	2		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket			3 Paket	36.246.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	3 Paket	75.000.000,00	DINAS PEMBER DAYAAN PEREMPUAN, DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		4	1	5	0		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	1325 Orang			265 Orang	55.684.900,00	Kota Blitar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Karyawan - karyawati	265 Orang	135.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Peraturan Perundang-Undangan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	DP3AP2KB			
	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			100 %	187.712.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	100%	397.000.000,00	
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	8.986.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	1 Paket	10.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas Pendidikan dan Kesehatan				
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			5 Paket	23.993.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	5 Paket	35.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	14.684.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	4 Paket	20.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
															milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			12 Paket	14.250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	2 Paket	18.000.000,00	DP3AP2KB					
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	18.060.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	1 Paket	20.000.000,00	DP3AP2KB					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															disabilitas.					
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	4	1	6	6			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			12 Dokumen	2.754.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawan DP3AP2KB	12 Dokumen	4.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	4	1	6	9			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan			40 Laporan	100.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawan DP3AP2KB	40 Laporan	280.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
	4	1	6	0																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	4.984.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	1 Dokumen	10.000.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%			100 %	145.881.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	100%	345.500.000,00		
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4.661.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat	Karyawan - karyawati DP3AP2KB		95.500.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
																			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																							Nasional	Daerah							
1	2					3					4					5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15	16		17
																				Semua Kel/Des a			pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan							
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
																			7 Unit	141.220.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	19 Unit	250.000.000,00	DP3AP2KB			
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar					100%				100 %	359.152.415,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	100%	410.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan								
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan			36 Laporan	90.539.960,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawan DP3AP2KB	36 Laporan	90.000.000,00	DP3AP2KB				
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan			13 Laporan	268.612.455,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawan DP3AP2KB	13 Laporan	320.000.000,00	DP3AP2KB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%			100 %	387.625.800,00			-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	100%	770.000.000,00	
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.357.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2KB		35.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	185 Unit			37 Unit	93.292.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1.	Karyawan - karyawati DP3AP2KB	37 Unit	160.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													a			Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan				
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	4	1		9	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	285 Unit			54 Unit	57.975.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2K B	57 Unit	75.000.000,00	DP3AP2K B
	2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	4	1		9	1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	207.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Karyawan - karyawati DP3AP2K B		500.000.000,00	DP3AP2K B
7	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate)	15,1 kelahiran			17,1 kelahiran	71.089.400,00						16,75 kelahiran	78.000.000,00	
	2	1	0	2.0		Pemaduan dan	Persentase Remaja	50%			23 %	14.527.400,00			Memperkuat	JATIM	Remaja	37%	12.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	2	1		Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	usia 15-19 tahun yang terpapar pendidikan kependudukan							pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	se-Kota Blitar				
	2	1	0	2.0	001	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
							Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	85 Kegiatan			10 Kegiatan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Remaja se-Kota Blitar	15 Kegiatan	3.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	002	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	1.000,00	Kota Blitar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Remaja se-Kota Blitar	1 Dokumen	4.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Tingkat Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan					
	2	1	0	2.0	002	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal															
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	100 Satuan Pendidikan			10 Satuan Pendidikan	14.525.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Remaja se-Kota Blitar	20 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu dan sesuai standar	100%			100 %	56.562.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1.	Warga se-Kota Blitar	100%	66.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan				
	2	1	0	2.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	15 Laporan			3 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pelaksana SIGA	3 Laporan	4.500.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	001	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	15 Dokumen			3 Dokumen	40.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan	Pengelola Data SIGA	3 Dokumen	45.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	dan Kesehatan				
	2	1	0	2.0	001	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15 Laporan			3 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pengelola Data Keluarga	3 Laporan	2.500.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	002	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5 Dokumen			1 Dokumen	16.160.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Penyusun Profil Bangsa Indonesia	1 Dokumen	14.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
															penyanggandisabilitas.										
8	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan	10,8 %			15 %	270.695.000,00						13,1%	548.500.000,00						
		4	3				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,95 %			8,09 %								8,07%						
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase organisasi/Stakeholder dan Mitra Kerja yang terpapar Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	100%			78 %	6.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pengolah data program Bangsa Kencana	100%	27.000.000,00						
	2	1	0	2.0	000	Pengendalian Program KKBPK																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	15 Laporan			3 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan	Peserta KB, Pasangan Usia Subur	3 Laporan	1.000.000,00	DP3AP2KB					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas Pendidikan dan Kesehatan								
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	73 Unit			10 Unit	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Peserta KB, Pasangan Usia Subur	21 Unit	1.000.000,00	DP3AP2KB				
	2	1	0	2.0	001	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	15 Laporan			3 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Balai Penyuluhan KB	3 Laporan	5.000.000,00	DP3AP2KB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Berencana)								milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	1	0	2.0	001	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20 Dokumen			4 Dokumen	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pasangan Usia Subur, Peserta KB	4 Dokumen	5.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang	20 Dokumen			4 Dokumen	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Pasangan Usia Subur, Peserta KB	4 Dokumen	5.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian i RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dilaksanakan								disabilitas.					
	2	1	0	2.0	001	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
	4	3		1	4		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Stakeholder dan mitra kerja Program bangga Kencana		10.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase SDM KB yang berdayaguna	100%			100 %	242.401.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kader Bangga Kencana, Kader IMP	100%	302.500.000,00	
	2	1	0	2.0	000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
	4	3		2	4															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2117 Orang			417 Orang	242.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kader Bangsa Kencana, Kader IMP	425 Orang	300.000.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	20 Laporan			4 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kader Bangsa Kencana, Kader IMP	4 Laporan	2.500.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							(PKB/PLKB)														
	2	1	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akseptor yang terlayani KB	100%			88 %	28.285.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)	100%	216.250.000,00		
	4	3	3				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	91%													
	2	1	0	2.0	000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20 Laporan			4 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)	4 Laporan	1.500.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0	000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
							Jumlah Orang	3340			552	1.000,00	Kota	PENDAPAT	Memperkuat	JATIM	Fasilitas	665	150.000.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang			Orang		Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TAN ASLI DAERAH (PAD)	pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)	Orang		B
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	82 Unit			9 Unit	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)	15 Unit	55.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca	1930 Orang			250 Orang	1.000,00	Kota Blitar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya	Fasilitas Kesehatan	400 Orang	1.250.000,00	DINAS DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Pelayanan bagi Peserta KB						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)								
	2	1	0	2.0	000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															4	3	8		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan			3 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)	3 Laporan	1.000.000,00	DP3AP2KB					
	2	1	0	2.0	001	Peningkatan Kesertaan KB Pria															4	3	3		
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	175 Orang			25 Orang	28.280.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	35 Orang	7.500.000,00	DP3AP2KB					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Kel/Desa		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	dan Jejaringnya, peserta KB (MKJP, KB Pria)			
	2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan pemberdayaan pelaksanaan Program Bangga Kencana	100%			45 %	3.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kampung Keluarga Berkualitas	68%	2.750.000,00	
	2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah DASHAT di Kampung KB	82 Unit			10 Unit	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kampung Keluarga Berkualitas	16 Unit	1.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															
	4	3	4	4	6		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	105 Kampung			21 Kampung	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kampung Keluarga Berkualitas	21 Kampung	1.250.000,00	DP3AP2KB	
	2	1	0	2.0	000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB															
	4	3	4	4	7		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15 Dokumen			3 Dokumen	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kampung Keluarga Berkualitas	3 Dokumen	500.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															disabilitas.					
9	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase keluarga yang aktif mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	55.01 %			55.01 %	304.622.000,00						55.01 %	244.000.000,00	
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan keluarga yang terbentuk	220K elompok			156 kelompok	304.620.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usahan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	189Kelompok	122.000.000,00	
	2	1	0	2.0	001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan	15 Laporan / Dokumen			3 Laporan / Dokumen	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	3 Laporan / Dokumen	3.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Keluarga Sejahtera (PPKS)						Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	raan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
	2	1	0	2.0	001	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Laporan			4 Laporan	281.588.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	4 Laporan	100.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																	an Keluarga Akseptor (UPPKA))			
	2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	395 Unit			56 Unit	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	76 Unit	15.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	002	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan	3200 Laporan			150 Laporan	23.028.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	650 Laporan	1.250.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)							Kel/Desa		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
	2	1	0	2.0	002	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	5 Laporan			1 Laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	1 Laporan	1.250.000,00	DP3AP2KB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																	Keluarga Akseptor (UPPKA))			
	2	1	0	2.0	002	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	960 Kelompok			156 Kelompok	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	189 Kelompok	1.500.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase keluarga berisiko stunting yang didampingi	100%			40 %	2.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas	Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	65%	122.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kesejahteraan Keluarga									peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
	2	1	0	2.0	000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	15 laporan			3 laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3 laporan	2.000.000,00	DP3AP2KB
	2	1	0	2.0	000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat	15 laporan			3 laporan	1.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	3 laporan	120.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							pendampingan								pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
	J U M L A H											6.430.537.614,00							8.673.048.976,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas P3AP2KB harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2026;
2. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja Dinas P3AP2KB tahun 2026 ;
3. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

5. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja DP3AP2KB Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Semoga Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.